

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Hubungan internasional merupakan studi yang mengkaji berbagai interaksi yang terjadi pada cakupan lintas batas negara. Interaksi yang terjadi dapat berbentuk kerjasama, persaingan maupun konflik. Hubungan Internasional seringkali dikaitkan dengan politik internasional, namun demikian studi ini tidak hanya mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan politik saja, hubungan internasional sangat dinamis yang hingga saat ini telah terdapat banyak unsur yang dikaji, seperti yang dikatakan Keith L. Shimko:

“Hubungan internasional mencakup keseluruhan yang kompleks mengenai hubungan-hubungan budaya, ekonomi, hukum, militer, politik, dan sosial dari semua negara, serta unsur-unsur populasi dan entitas mereka” (Shimko, 2013: 18).

Hubungan internasional yang dinamis tentunya akan luas juga ruang lingkungannya, Deutsch menjelaskan sekiranya ada dua belas aspek utama yang dikaji, yakni:

1. Bangsa dan dunia (*nation and world*)
2. Proses-proses transnasional dan interdependensi internasional (*transnational process and international interdependence*)
3. Perang dan damai (*war and peace*)

4. Kekuatan dan kelemahan (*power and weaknes*)
5. Politik internasional dan masyarakat internasional (*international politics and international society*)
6. Kependudukan versus pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup (*world population vs food, resources and environtment*)
7. Kemakmuran dan kemiskinan (*prosperity and poverty*)
8. Kebebasan dan penindasan (*freedom and oppression*)
9. Persepsi dan ilusi (*perception and illusion*)
10. Aktivitas dan apati (*activity and apathy*)
11. Revolusi dan stabilitas (*revolution and stability*)
12. Identitas dan transformasi (*identity and transformation*) (Ikbar, 2014: 130).

Pada awalnya interaksi yang terjadi dalam hubungan inernasional hanya dipraktekan oleh negara satu dengan negara yang lainnya, namun saat ini aktor dalam hubungan inernasional telah mengalami perkembangan yang dimana terdapat pihak lainnya yang diluar pemerintahan sebuah negara turut juga terlibat, Bakry menjelaskan terdapat beberapa aktor dalam hubungan internasional, yakni:

1. Negara bangsa
2. Organisasi antar pemerintahan (*Intergovernmental Organization -IGO*)
3. Organisasi non pemerintahan (*Non-governmental Organization -NGO*)
4. Perusahaan-perusahaan multinasional (*Multinational Corporations - MNC*)
5. Kelompok-kelompok teroris

6. Individu dan aktor hubungan internasional lainnya (Bakry, 2017: 187-215).

### **2.1.2 Perdagangan Internasional**

Setiap negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dalam negerinya sendiri. Dalam usaha pemenuhannya dibutuhkan sumber-sumber dari luar yang memang tidak terdapat didalam negeri. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, konfigurasi geografis, sumber daya manusia, kependudukan, spesifikasi tenaga kerja, struktur ekonomi, tingkat harga, struktur sosial dan politik, dan bentuk perbedaan yang lainnya. Maka dalam hal tersebut terjadilah proses pertukaran, yang kemudian dalam skala luas dikenal sebagai perdagangan internasional (Halwani, 2005:1).

Konsep mengenai perdagangan internasional hadir sejalan dengan munculnya teori keuntungan absolut oleh Adam Smith pada abad ke 17 di Eropa. Konsep tersebut secara umum menjelaskan faktor yang mendasari terjadinya perdagangan antar negara adalah keuntungan absolut Ricardo (1817). Dalam kajian hubungan internasional, ilmu perdagangan internasional merupakan bagian kecil dari ilmu ekonomi induk dari. Secara garis besar, ilmu ini mempelajari serta menganalisis ketergantungan yang terjadi diantara negara-negara di dunia. Selain itu juga, dalam ilmu perdagangan internasional membahas mengenai arus barang maupun jasa, pembayaran-pembayaran yang terjadi diantara negara di dunia, serta kebijakan-kebijakan yang mengatur arus, juga pengaruhnya pada kesejahteraan sebuah negara (Oktaviani, 2009:63).

Terdapat dua bentuk dalam perdagangan internasional, yakni perdagangan barang (fisik), maupun perdagangan jasa (biaya transportasi, perjalanan (*travel*), asuransi, pembayaran bunga, dan *remittance*, serta *fee* atau *royalty* teknologi (lisensi). Pelaku dalam perdagangan internasional adalah dalam beberapa pihak, seperti penduduk atau warga negara biasa, perusahaan ekspor maupun perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara serta departemen pemerintah (Sobri, 2000:1-2). Dengan terlaksananya perdagangan internasional, negara-negara di dunia akan mendapatkan manfaatnya, seperti:

1. Memperoleh barang yang tentunya tidak dapat diproduksi di negeri sendiri.
2. Memperoleh keuntungan dari hasil produk spesialisasi.
3. Memperluas pasar yang akan menambah keuntungan.
4. Transfer teknologi yang modern.

Namun demikian, pelaksanaan dalam perdagangan internasional dapat dikatakan rumit dan kompleks. Hal tersebut disebabkan karena terdapatnya batas-batas politik dan kenegaraan yang akan menghambat perdagangan, seperti diterapkannya bea, tarif, maupun kuota barang impor. Kerumitan lainnya timbul dari adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran, timbangan serta hukum yang berlaku diantara negara dalam konteks perdagangan (Amir, 2002: 13-14). Dalam perdagangan Internasional juga terdapat bentuk perlindungan (*protection*) yang merupakan tindakan efektif sebuah pemerintah untuk melindungi produsen dalam negeri dari produk luar. Proteksi tersebut terdiri dari hambatan formal (berupa tarif dan kuota (dilaksanakan secara transparan) dan lisensi serta standar-

standar yang diterapkan dalam sebuah produk (dilaksanakan secara tidak transparan)). Kemudian hambatan non formal dapat berupa akses yang mendiskriminatif terhadap penegakan hukum, kontrak dan informasi pasar (Benhofen, 2013: 321).

### **2.1.3 Organisasi Internasional**

Interaksi yang terjadi dalam hubungan internasional tidak hanya terlaksana diantara pemerintahan setiap negara saja, terdapat juga alternatif yang lainnya yakni organisasi internasional. Menurut Graham Evans dan Jeffrey Newnham, mendefinisikan organisasi internasional sebagai struktur kelembagaan yang melampaui batas-batas nasional yang dibentuk secara formal melalui perjanjian multilateral, yang memiliki tujuan untuk mendorong kerjasama secara internasional dalam bidang hukum, keamanan, diplomasi, ekonomi, dan masalah sosial (Bakry, 2017: 172).

Sama halnya dengan sebuah pemerintahan, organisasi internasional memiliki karakternya masing-masing, menurut Jan Klabbbers terdapat tiga bentuk:

1. Organisasi internasional yang dibuat oleh negara maupun pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili negara.
2. Organisasi internasional yang dibentuk melalui sebuah perjanjian sebagai sarananya.
3. Organisasi internasional setidaknya diharuskan memiliki sebuah organ yang memiliki kehendak yang berbeda dari kehendak dari negara-negara anggotanya (Klabbbers, 2002: 9-13).

Dapat disimpulkan jika organisasi internasional turut juga berkontribusi dalam tatanan global sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing. Untuk dapat memahami secara lebih komprehensif mengenai organisasi internasional, Theodore Coulombis dan James Wolfe mengelompokkan organisasi internasional dalam tiga level;

1. Dari level tujuan, organisasi internasional dibentuk untuk dapat mencapai semua maupun sebagian dari tujuan-tujuan, yang pada umumnya sebagai berikut:
  - a. Pengaturan hubungan internasional yang secara khusus dapat melalui cara-cara penyelesaian sengketa antar negara-bangsa yang dilaksanakan secara damai
  - b. Dapat meminimalisir bahkan mengontrol konflik-konflik (perang) dalam lingkup internasional.
  - c. Mempromosikan kegiatan bahkan kerja sama dalam pembangunan antarnegara untuk upaya kepentingan sosial dan ekonomi dalam wilayah-wilayah tertentu maupun kepentingan kemanusiaan pada umumnya.
  - d. Secara kolektif dijadikan sebuah pertahanan dari sekelompok negara-bangsa untuk dapat menghadapi ancaman-ancaman eksternal.
2. Dari level institusi, organisasi internasional secara umum dapat dibagi kedalam dua kategori;

- a. Organisasi antar pemerintah (*Intergovernmental Organization* - IGO), dibentuk oleh pemerintahan antar negara
  - b. Organisasi non-pemerintah (*Non-governmental Organization* - NGO), dibentuk dengan tidak mengatasnamakan maupun melibatkan negara-negara.
3. Dari level proses, dalam penjelasannya Theodore Couloumbis dan James Wolfe menyebutkan jika proses yang terjadi dalam organisasi internasional secara umum digambarkan sebagai bentuk dasar dari regulasi global, dengan subjek yang terdapat didalamnya yang kebanyakan merupakan negara-negara yang diwakili oleh pemerintahnya masing-masing. Fungsi dari sebuah organisasi internasional umumnya tidak secara langsung dapat berpengaruh terhadap anggota-anggotanya (Bakry, 2017: 173).

### **2.1.3.1 Organisasi Internasional Non-pemerintahan**

Dibandingkan dengan organisasi internasional antar-pemerintah, eksistensi organisasi internasional non-pemerintah dalam lingkup hubungan internasional masih dikatakan baru. Pada tahun 1945, terminologi “organisasi non-pemerintah” baru diperkenalkan. Pada saat itu, para pendiri PBB yang menyatakan jika organisasi-organisasi internasional non-pemerintah akan diberikan status sebagai pengamat (*observer*) di Majelis Umum PBB maupun dalam beberapa pertemuannya PBB lainnya. Sejak itulah yang kemudian menjadikan organisasi non-pemerintah digunakan secara meluas dalam berbagai keperluan. Menurut PBB sendiri, organisasi internasional non-pemerintah merupakan jenis organisasi yang

dikelola oleh swasta yang memiliki struktur yang jelas, beroperasi dalam lingkup internasional, serta tidak bergantung pada kontrol pemerintah, yang dalam mekanismenya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, melaksanakan *nonprevention*, dan bukan oposisi dari sebuah partai politik.

Organisasi non-pemerintahan atau *International non-government organization* merupakan sebuah organisasi nirlaba yang terpisah dari negara atau independent, namun dalam pembentukannya dapat memungkinkan adanya campur tangan negara. Menurut Craig Warkentin, organisasi internasional non-pemerintahan merupakan sebuah asosiasi oleh pihak swasta, yang dilaksanakan secara sukarela, dan bersifat nirlaba. Dalam konteks hubungan internasional, definisi organisasi internasional non-pemerintahan pada umumnya merujuk pada sebuah kelompok yang struktur keanggotaan dan aktivitas keorganisasiannya melintasi batas-batas nasional (Bakry, 2017: 197).

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, karakternya setiap organisasi internasional non-pemerintahan tentunya memiliki spesifikasinya masing-masing, David Lewis mengelompokkan karakter-karakter tersebut dalam lima bentuk, yakni;

1. Bersifat formal, merupakan organisasi yang didalam kelembagaannya dibentuk pertemuan-pertemuan secara rutin, terdapatnya kantor pendukung, serta kelengkapan lainnya yang mendukung keberlangsungan organisasi tersebut.
2. Bersifat privat, yang berarti secara institusinya terpisah dari pemerintahan yang ada, meskipun dapat dimungkinkan dalam



menjalankan aktivitasnya organisasi ini menerima dukungan dari pemerintah.

3. Berorientasi nirlaba, dalam artian jika organisasi tersebut dalam melaksanakan aktivitasnya mendapatkan kelebihan dana, maka dana tersebut tidak akan diperuntukkan bagi pemilik maupun direksi dalam organisasi tersebut.
4. Mengelola sendiri (*self-governing*), yang berarti mampu dalam mengendalikan dan *manage* urusan-urusan keorganisasiannya sendiri.
5. Bersifat sukarela (*voluntary*), yang berarti partisipan maupun staf yang terlibat didalamnya melaksanakan aktivitas dan *managing* keorganisasian secara sukarela (Lewis, 2014: 58).

Terdapat ragam organisasi internasional non-pemerintahan di seluruh dunia dengan segala jenis dan tujuannya. Bakry menjelaskan jika setidaknya, terdapat empat bentuk organisasi berdasarkan orientasinya;

1. Berorientasi amal (*charitable orientation*), dalam hal ini pada umumnya melibatkan upaya paternalistik yang bersifat *top-down*, yang didalamnya terdapat sedikit partisipasi dari para "penerima manfaat". Dalam hal ini mencakup organisasi yang lebih diarahkan untuk dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupan.
2. Berorientasi pelayanan (*service orientation*), pada umumnya yang dilaksanakan dalam organisasi ini mencakup kegiatan pelayanan

kesehatan, keluarga berencana, layanan pendidikan dan bentuk layanan lainnya, yang dimana dalam perancangan programnya masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan dan menerima layanan.

3. Berorientasi partisipatif (*participatory orientation*), proyek-proyek yang dilaksanakn oleh organisasi ini ditandai dengan adanya swadaya dari masyarakat local yang terlibat baik dalam bentuk pemberian donasi maupun dalam pelaksanaan proyek.
4. Berorientasi pemberdayaan (*empowering orientation*), organisasi ini bertujuan untuk dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang penting yang mempengaruhi dalam kehidupan, seperti sosial, politik, dan ekonomi, yang kemudian akan memperkuat kesadaran bahwa mereka memiliki kekuatan potensial untuk hidup lebih baik (Bakry, 2017: 199).

### **2.1.3.2 Peranan Organisasi Internasional**

Seiring dengan dinamisnya perkembangan dalam hubungan internasional, peranan organisasi internasional semakin bertumbuh karena adanya pengakuan dari aktor-aktor yang memiliki legitimasi, seperti negara-bangsa ataupun PBB. Kemudian didukung juga dengan terdapat beberapa gerakan transnasional yang telah dilaksanakan organisasi-organisasi internasional berhasil dapat menumbuhkan gagasan-gagasan yang positif secara progresif.

Peranan sebuah organisasi internasional pada umumnya berkaitan dengan aktivitas organisasi yang kemudian dipahami sebagai fungsi dan status serta kedudukannya dalam sistem global. Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi internasional secara umum dianggap sebagai menunjukkan perannya. Menurut Perwita dan Yani, peranan dapat diartikan sebagai sebuah tuntutan yang diberikan dalam bentuk struktural yang masuk kedalam konsep tanggung jawab yang didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan untuk menghubungkan serta mendukung fungsi sebuah organisasi (Perwita dan Yani, 2005: 31).

Berbicara mengenai peranan organisasi internasional, Clive Archer menjelaskan jika terdapat tiga peranan utama dari organisasi internasional, yaitu:

1. Instrumen, merupakan sebuah *image* yang melekat pada sebuah organisasi internasional yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh anggotanya untuk kepentingan khusus organisasinya.
2. Arena, organisasi internasional dapat dijadikan sebuah arena maupun forum yang dikondisikan secara netral dimana terdapat aksi yang dilaksanakan, yang dalam hal ini, organisasi internasional akan menyediakan sebuah tempat bagi para anggotanya untuk dapat berdiskusi, berargumentasi, bekerja sama ataupun tidak tertutup kemungkinan untuk menyatakan tidak setuju.
3. Aktor independen, yang dalam hal ini setiap keputusan maupun tujuan dalam organisasi dapat terlaksana tanpa adanya pengaruh yang signifikan oleh kekuatan-kekuatan eksternal (Acharya, 2008: 135).

Peranan sebuah organisasi internasional memiliki berbagai bentuknya, sesuai dengan pendapat Archer, setidaknya terdapat tiga kategori bentuk peranan organisasi internasional;

1. Sebagai legitimasi secara kolektif untuk berbagai aktivitas organisasi maupun aktivitas anggota dilaksanakan secara individual.
2. Sebagai penentu sebuah agenda internasional diluar konsep pemerintahan.
3. Sebagai wadah maupun instrument untuk koalisi antar anggotanya atau juga untuk koordinasi kebijakan yang terjadi antar pemerintah sebagai mekanisme dalam menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Bennet, 2005: 8).

#### **2.1.4 Isu-isu Lingkungan dalam Hubungan Internasional**

Interaksi yang terjadi dalam lingkup hubungan internasional sangat dinamis, oleh karena alasan tersebutlah kajian dalam hubungan internasional semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman. salah satu kajian baru adalah *Green perspective*. Secara singkat, awal mula kajian ini lahir adalah pada tahun 1972, dimana dilaksanakannya konferensi PBB oleh 144 negara di Stockholm mengenai lingkungan hidup manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*). Hal tersebut terjadi karena masyarakat dunia mulai menyadari jika lingkungan telah menjadi isu ketiga utama setelah keamanan dan ekonomi global (Jackson dan Sorensen, 2013: 324).

Charles Kegley dan Shannon Blanton berpendapat jika ancaman terhadap lingkungan merupakan hal yang nyata karena sekarang planet bumi telah dalam

keadaan bahaya yang mengharuskan tanggungjawab bersama seluruh masyarakat dunia untuk dapat menanggulangnya (*global responsibility*). Lingkungan merupakan milik bersama (*common good*) yang akan memberikan dampak terhadap seluruh negara dan bangsa, hal tersebut dikarenakan degradasi lingkungan tidak akan mengenal batas wilayah dan negara, secara langsung maupun tidak langsung banyak pihak yang akan terkena dampaknya (Joyce Kaufman). Sebagai salah satu contohnya, ketika hutan di Indonesia mengalami kebakaran, dampak dari asapnya tidak hanya akan terjadi di Indonesia saja, namun negara sekitarnya seperti Malaysia dan Singapura akan juga terkena dampak dari asap tersebut, yang kemudian lebih jauh akan mempengaruhi hubungan antar negara tersebut (Kaufman, 2015: 209).

Perspektif hijau ini memandang jika aktivitas sosial dan ekonomi terutama yang tidak bertanggungjawab merupakan sebuah ancaman bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Menurut Jill Steans dan Lloyd Pettiford, perspektif ini mengkaji secara menyeluruh hubungan antara manusia dengan ekosistem global. *Green perspective* memandang jika bentuk sistem negara yang kontemporer, struktur utama dalam ekonomi global, maupun beberapa institusi global yang ada, merupakan sebagai bagian yang mempengaruhi masalah-masalah lingkungan global, bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern seperti yang berkembang pada abad ini dalam beberapa bagian tertentu juga merupakan penyebab dari terjadinya degradasi lingkungan global (Steans dan Pettiford, 2001: 179).

Menurut Charles Kegley dan Shannon Blanton, disebutkan jika terdapat dua perspektif besar dalam isu-isu lingkungan global yang ada, yakni:

1. Perspektif *cornucopian*, berpendapat jika ketidakseimbangan dan masalah lingkungan dapat terkoreksi jika perdagangan bebas dan pasar bebas diterapkan. Penyesuaian mekanisme utama dari harga merupakan kunci untuk kebaikan untuk bersama.
2. Perspektif *neo-Malthusian*, berpendapat sebaliknya, jika pasar bebas lah yang menjadi penyebab gagalnya pencegahan eksploitasi yang berlebihan pada sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable resources*) maupun sumber daya yang tidak dapat diperbarui (*nonrenewable resources*), oleh karena alasan tersebutlah dibutuhkan keterlibatan dan intervensi oleh institusi-institusi yang akan mengatur (Kegley dan Blanton, 2009: 554-555).

Serupa dengan kajian dalam hubungan internasional lainnya, isu-isu dalam lingkungan global tentu memiliki banyak bentuknya, Kate O'Neill berpendapat jika terdapat tiga kelompok dalam pembagian kategori dalam masalah lingkungan yang terjadi, yakni:

1. Isu lingkungan global bersama (*global environmental common issues*), diantaranya;
  - a. Hal-hal yang akan mempengaruhi atmosfer
  - b. Kondisi cuaca yang telah berubah (*climate change*)
  - c. Lapisan ozon di stratosfer yang mulai menipis (*depletion of stratospheric ozone layer*)

- d. Ikan di lautan lepas yang ditangkap secara berlebihan (*over-fishing in the high seas*)
  - e. Masalah-masalah yang terjadi Antartika.
2. Isu lingkungan yang terjadi dalam lintas batas (*trans-boundary environmental issues*), diantaranya;
- a. Pencemaran udara yang terjadi dalam lintas batas dengan jarak yang jauh (*long-range trans-boundary air pollution*), sebagai contoh terjadinya hujan asam dan adanya asap kebakaran hutan
  - b. Pencemaran-pencemaran yang terjadi di sungai
  - c. Perdagangan global yang dilaksanakan secara tidak bertanggungjawab dengan limbah berbahaya sebagai konsekuensinya.
3. Masalah lingkungan yang terjadi dalam lingkup lokal yang bersifat kumulatif (*local-cumulative environmental issues*), yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) (O'Neill, 2009: 31-33).

Dengan munculnya *Green Perspective*, tentu akan memberikan kontribusi dalam hubungan Internasional. Kontribusi tersebut dapat dilihat dengan munculnya berbagai kerjasama internasional yang terjalin diantara berbagai negara yang memfokuskan kegiatannya pada penyelesaian permasalahan lingkungan hidup. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan upaya yang sangat besar untuk menyelaraskan antara aspek dan perilaku sosial juga politik yang ada.

#### 2.1.4.1 Pembangunan Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi *Brundtland* yang menyatakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.” Menurut Heal, konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi:

“*Pertama* adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. *Kedua* adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.” (Fauzi, 2004: 51)

Dengan konsep keberlanjutan yang multidimensi, kemudian Haris berpendapat bahwa konsep ini dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yakni:

1. Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.
2. Keberlanjutan lingkungan: Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini menyangkut juga pada pemeliharaan keanekaragaman hayati yang ada,



mengkondisikan stabilitas di ruang udara, serta fungsi-fungsi ekosistem dalam bentuk lainnya yang tidak termasuk pada kategori sumber-sumber ekonomi.

3. Keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik (Sutamihardja, 2004: 3).

Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Pada saat ini permasalahan pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah isu penting yang perlu terus di sosialisasikan ditengah masyarakat dunia.

Senada dengan konsep tersebut, Sutamihardja menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan yang diarahkan pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, juga menekankan serendah mungkin pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
2. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi

gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.

3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya (Sutamihardja, 2004: 56).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Cakupan dan interaksi yang terjadi dalam hubungan internasional sangat luas, terdiri dari banyak bidang, aktor, maupun aspek yang terlibat didalamnya. Sebuah negara tidak dapat sepenuhnya berdiri sendiri untuk dapat menjaga dan memenuhi keberlangsungan negaranya, maka dibutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing negara. Dengan semakin berkembangnya peradaban, pihak yang bekerjasama dalam cakupan yang melintas batas negara bukan hanya dilakukan oleh pemerintahan sebuah negara saja, semua

pihak dalam masyarakat global perlu turut serta dan terlibat dalam dinamika hubungan internasional agar dapat menjadikan tatanan dunia menjadi lebih baik.

Perdagangan internasional merupakan salah satu interaksi yang terjadi dalam konteks hubungan internasional, secara umum bentuk interaksi yang terjadi adalah penjualan atau pembelian suatu barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meskipun demikian, perdagangan internasional dalam prakteknya cukup kompleks. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan ideologi, politik, mata uang dan hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Selain hal itu, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya pertumbuhan maupun teknologi, untuk dapat melindungi persaingan yang terjadi, sebuah negara membuat sebuah hambatan dagang agar produk yang diproduksi didalam negerinya sendiri tidak mengalami kerugian akibat tergerus oleh produk yang dibeli dari luar. Terdapat dua bentuk hambatan dagang yang ada, yakni hambatan dagang tarif yang berbentuk pajak maupun kuota, dan hambatan dagang non tarif yang berbentuk standarisasi yang berlaku maupun diskriminasi informasi pasar.

Perdagangan internasional merupakan upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yang dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang dikarenakan semakin meningkatnya jumlah populasi di dunia. Hal tersebut menjadikan setiap produsen dari setiap negara berlomba untuk bisa memenuhinya dan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut memberikan dampak yang buruk, dikarenakan terkadang proses produksi produk-produk tersebut tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup, sosial dan aspek lainnya. Oleh karena alasan tersebutlah, isu permasalahan mengenai lingkungan

hidup cukup menjadi perhatian saat ini. Ekosistem yang menjadi tempat kita hidup sekarang merupakan tanggungjawab bersama secara global, karena semua yang dilakukan sekarang secara akumulatif akan mempengaruhi keberlangsungan bagi kehidupan dunia di masa yang akan datang. Jika lingkungan di sebuah wilayah rusak dan tidak dijaga maka secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi ekosistem global. Maka dari itu, setiap pihak dan setiap aspek seperti sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan harus bisa dibentuk dan dibangun secara selaras agar keberlanjutan dapat dipertahankan, dari situlah kemudian muncul konsep pembangunan berkelanjutan. Terdapat tiga aspek utama dalam konsep pembangunan berkelanjutan, yakni keberlanjutan dalam aspek ekonomi, keberlanjutan dalam aspek ekologi dan keberlanjutan dalam aspek sosial.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, turut serta dalam perdagangan internasional. Salah satu produk komoditas yang melimpah adalah kelapa sawit, yang dimana Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, namun dalam proses produksinya belum sepenuhnya menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa permasalahan yang akan timbul ketika konsep tersebut belum diterapkan oleh berbagai pihak. Pertama, tidak ramah terhadap lingkungan yang dimana hutan primer ditebang untuk dibuka sebagai lahan perkebunan kelapa sawit yang kemudian akan berdampak pada hilangnya hutan dan mengancam habitat flora dan fauna yang ada di Indonesia. Seperti diketahui juga, Indonesia merupakan tempat tinggal bagi banyak suku yang tersebar diberbagai wilayah, tidak jarang jika masih terdapat suku-suku tertentu yang masih tinggal dan hidup di pedalaman hutan, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan

terganggu karena dibutuhkannya perluasan lahan perkebunan kelapa sawit yang secara langsung akan berdampak pada sistem sosial yang ada di Indonesia. Kemudian permasalahan lainnya yang utama yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah meskipun produk minyak kelapa sawit sangat dibutuhkan di dunia yang tentunya akan sangat menguntungkan bagi perekonomian di Indonesia, namun tidak demikian karena nyatanya sebagian besar hasil keuntungan yang didapat dari produk ini hanya dimiliki dan dinikmati oleh perusahaan dan pihak-pihak besar lainnya, sedangkan para petani yang berperan sangat besar dalam proses produksi yang minyak kelapa sawit tidak mendapatkan upah dan keuntungan yang sesuai yang kemudian akan berdampak pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perekonomian mereka, dalam hal ini secara spesifik pendapatan para petani kelapa sawit tersebut, yang juga secara lebih jauh akan berdampak juga pada aspek-aspek lainnya.

Masyarakat global yang telah menyadari akan dampak negatif yang ditimbulkan dari proses produksi produk yang tidak berkelanjutan mulai menuntut pasar global untuk dapat menyediakan produk yang berkelanjutan. Dalam hal ini, hal tersebut secara tidak langsung menjadi hambatan bagi produk minyak kelapa sawit Indonesia masuk ke pasar yang lebih luas yakni pasar global. Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut dibutuhkan wadah yang lebih besar agar setiap pihak dapat bekerjasama demi tujuan yang sama. Organisasi internasional merupakan salah satu wadah bagi setiap pihak (negara maupun swasta) untuk dapat bekerjasama dalam sebuah kerangka yang terstruktur dengan jelas. Ketika sebuah pihak berinisiatif untuk menjalin kerjasama dengan pihak lainnya, berarti disitu

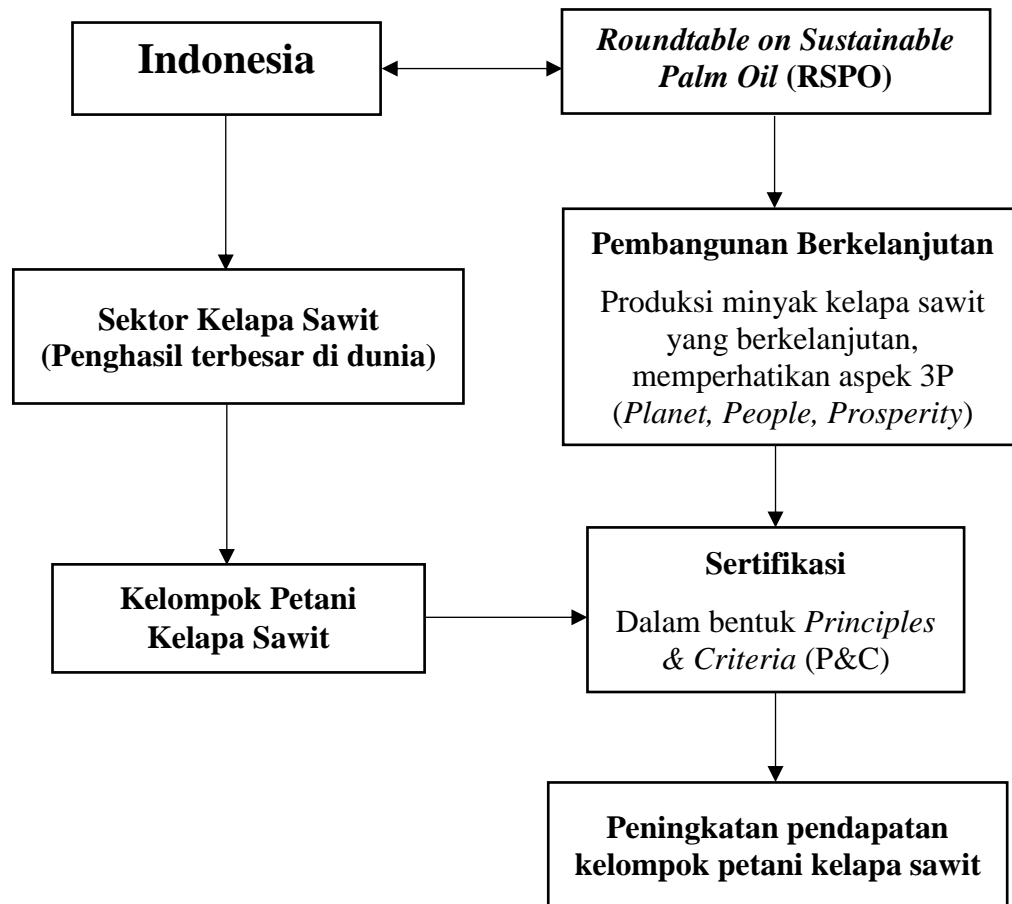
terdapat sebuah kepentingan dan tujuan yang tidak mungkin dapat dicapai sendirian, dan akan lebih baik jika banyak pihak yang terlibat baik dalam organisasi internasional antarpemerintahan maupun organisasi internasional yang non-pemerintahan.

Telah terdapat beberapa organisasi internasional yang berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, salah satunya *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Sesuai dengan namanya, RSPO hadir karena keprihatinan akan produksi dan penggunaan minyak kelapa sawit yang tidak memperhatikan aspek-aspek berkelanjutan. Tanpa disadari, minyak kelapa sawit merupakan bahan campuran yang banyak dipergunakan dalam produk-produk yang kita gunakan sehari-hari. RSPO mempersatukan para *stakeholder* dari sektor industri minyak sawit, yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan. RSPO mempromosikan praktik-praktik produksi minyak kelapa sawit yang membantu mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghargai mata pencaharian masyarakat pedesaan di negara-negara penghasil minyak kelapa sawit.

Dalam hal ini RSPO memiliki peranan yang cukup signifikan, yang dimana secara umum anggota dan pihak yang terlibat didalamnya akan mendapatkan kelayakan hidup dari diterapkannya pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip dan kriteria dalam RSPO. RSPO merupakan organisasi yang mempersatukan tujuh sektor para *stakeholder* yang terlibat dalam kelapa sawit, seperti petani kelapa sawit, penjual dan atau yang memproduksi minyak kelapa sawit, pabrik yang

memproduksi barang konsumsi sehari-hari, investor atau bank dan sektor-sektor lainnya dari sekitar 92 negara yang ada di dunia. Dengan demikian potensi semakin terstruktur dan meluasnya pasar akan minyak kelapa sawit akan secara langsung maupun tidak meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit di Indonesia yang turut serta menjadi anggota RSPO.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, kerangka pemikiran yang diharapkan akan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran